

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara ,2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung. PT, Remaja Rosdakarya.
- Abdul Hafiz, Tanjung. 2000. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Adrianto, Nico. 2007. Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Palangkaraya : Bayu Media.
- Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- Amitai, Etzioni, 1985, Organisasi-Organisasi Modern, UI Press, Jakarta
- Beni Pekei. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Bovens, M. 2007. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework". European Law Journal. Vol. 13.
- Campbell, J.P 1989, Teori Efektivitas , dalam Richard M:Efektivitas Organisasi 2005 Bandung: Erlangga
- Dharma, Surya. 2010. Manajemen Kinerja. Ed.ketiga. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Edy, Sutrisno, (2016), Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Gibson, et al. 1996. Organizational Behavior, Structure, Process, 8th Edition. Alih Bahasa: Adiardini. Editor Saputra. Jakarta: Binarupa Akasara.

Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lawrence, R. P. & Lorsch, W. J., 1967. Organization And Environmen. Irwin : homewood

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.

Mustopadidjaja AR (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk itu dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, transparansi dan efektivitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini didalamnya membahas tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Belanja Desa, Pendapatan Desa dan, Pembiayaan Desa.

Raba, Manggaukang 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.

Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara,

Robbins, Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta.

- Sabarno. H. 2007. Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika,
- Schein, Edgar H., (2010),”Organizational Culture and Leadership”, Jossey Bass, San Francisco.
- Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
- Steers, Richard M. 1977. Efektivitas Organisasi. Seri Manajemen No. 47, Jakarta : Erlangga
- Steers. 1985. “Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment”. *Administrative Science Quarterly*, 22, 46-56
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Wahyudi Kumorotomo. 2005. Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi-Parlementer. Gava Media. Yogyakarta
- Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Study empiris di Provinsi Papua. Universitas Diponegoro. Semarang.

